



TUGAS AKHIR

ANALISIS PEREKAMAN DATA WAJIB PAJAK DARI HASIL PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Akademi Ahli Madya (A.md)
Pada Program Studi D III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MHD. ICHSAN FATHURRAHMAN

NIM : 01770613202

PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAS SYARIF KASIM RIAU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

NAMA : MHD. ICHSAN FATHURRAHMAN
 NIM : 01770613202
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 JUDUL : ANALISIS PEREKAMAN DATA WAJIB PAJAK DARI HASIL PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK

Pekanbaru, 5 Juli 2020

Disetujui oleh:

Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19790101 200710 1 003

MENGETAHUI

DEKAN

KETUA JURUSAN



Dr. Drs. M. Muhi. Said. HM. M.Ag. MM
 19620512 198903 1 003

Sahwitri Triandani, S.E, M.Si
 NIP.19820806 2 00604 2 002

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

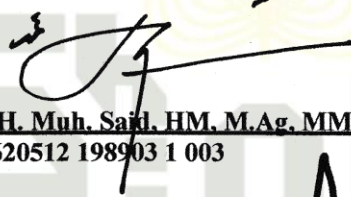
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : MHD. ICHSAN FATHURRAHMAN
NIM : 01770613202
PROGRAM STUD : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
FAKULTAS : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
JUDUL : ANALISIS PEREKAMAN DATA WAJIB PAJAK DARI
HASIL PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB) PADA BADAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN SIAK
TANGGAL UJIAN : 9 JULI 2020

Pekanbaru, 9 Juli 2020

Disetujui Oleh :

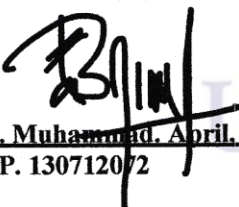
KETUA PENGUJI



Dr. Drs. H. Muh. Satri, HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

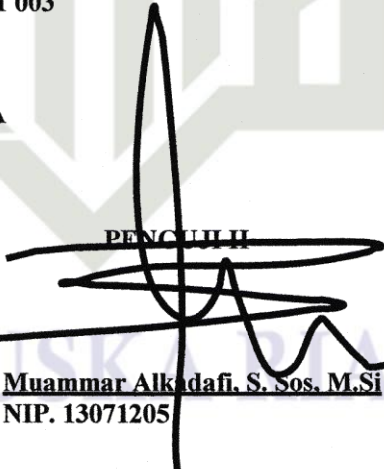
ANGGOTA

PENGUJI I



Dr. Muhammad April, SH, M.Hum
NIP. 130712072

PENGUJI II



Muammar Alkadafi, S. Sos, M.Si
NIP. 13071205

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

**ANALISIS PEREKAMAN DATA WAJIB PAJAK DARI HASIL
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA BADAN
KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

OLEH :

MHD. ICHSAN FATHURRAHMAN

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semua jenis organisasi baik pemerintah maupun swasta menggunakan sistem informasi untuk memudahkan suatu organisasi untuk mempermudah pekerjaannya. Salah satu sistem yang digunakan oleh bagian perpajakan adalah SISMIO. Penerapan sistem informasi di suatu instansi harus dilakukan dengan langkah yang sesuai, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perekaman data wajib pajak sehingga pekerjaan yang dilakukan lebih terarah. Berdasarkan hasil penelitian mekanisme perekaman data wajib pajak dilakukan dengan dua tahap yaitu pendataan SPOP dan LSPOP serta basis data.

Kata Kunci : Pajak, SISMIO, Sistem Informasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil'alamin

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini tepat pada waktunya dengan judul ” **Analisis Perekaman Data Wajib Pajak dari Hasil Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) di Jurusan D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada yang terhormat :

1. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan saya materi selama saya menjalani kuliah, memberikan motivasi, serta doa yang tidak ada habisnya untuk saya.
2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pembantu Rektor I, II dan III yang telah memberi waktu kepada penulis untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi ini.
3. Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Wakil Dekan I, II, III yang memfasilitasi dengan kebijakan-kebijakannya.
4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
5. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan nasehat, motivasi, serta membantu dalam perbaikan kesalahan-kesalahan dalam penulisan Tugas Akhir ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan DIII Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak kepala dan seluruh staf karyawan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang telah memberikan banyak bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini.
8. Bapak/Ibu Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta stafnya yang telah membantu penulis dalam memberikan referensi untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian. Semoga bantuan yang diberikan menjadi amal sholeh, aminn

Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari laporan tugas akhir ini, serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14 Mei 2020

Penulis

Mhd. Ichsan Fathurrahman

DAFTAR ISI

COVER

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR GAMBAR..... vii

DAFTAR TABEL..... viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah..... 4

1.3 Tujuan Penulisan..... 4

1.4 Manfaat Penulisan..... 4

1.5 Metode Penulisan..... 5

1.5.1 Lokasi Penelitian..... 5

1.5.2 Waktu Penelitian..... 5

1.5.3 Jenis Data..... 5

1.5.4 Metode Pengumpulan Data..... 5

1.5.5 Analisis Data..... 6

1.6 Sistematika Penulisan 6

BAB II GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 8

2.1 Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 8

2.2 Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 10

2.3 Visi dan Misi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak..... 11

2.4 Uraian Tugas Bagian/ Unit Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 12

2.4.1 Kepala Badan 12

2.4.2 Sekretariat 12

2.4.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian..... 13

2.4.2.2 Sub Bagian Kepegawaian..... 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.2.3 Sub Bagian Keuangan	14
2.4.3 Bidang Pembiayaan	15
2.4.3.1 Sub Bagian Anggaran.....	16
2.4.3.2 Sub Bagian Belanja Pegawai.....	17
2.4.3.3 Sub Bagian Perbendaharaan	17
2.4.4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan.....	18
2.4.4.1 Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan	19
2.4.4.2 Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan.....	19
2.4.4.3 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi	20
2.4.5 Bidang PAD dan Dana Perimbangan.....	20
2.4.5.1 Sub Bidang Pendaftaran	21
2.4.5.2 Sub Bidang Penagihan.....	22
2.4.5.3 Sub Bidang Pemeriksaan.....	23
2.4.6 Bidang PBB dan BPHTB.....	24
2.4.6.1 Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB	24
2.4.6.2 Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB	25
2.4.6.3 Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.....	26
2.4.7 Bidang Aset.....	27
2.4.7.1 Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi	28
2.4.7.2 Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi.....	29
2.4.7.3 Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.....	29
BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	31
3.1 Tinjauan Teori	31
3.1.1 Pengertian Pajak	31
3.1.2 Fungsi Pajak.....	31
3.1.3 Dasar Pemungutan Pajak	32
3.1.4 Syarat Pemungutan Pajak	34
3.1.5 Jenis Pajak.....	34
3.1.5.1 Jenis Pajak Berdasarkan Sifat	34
3.1.5.2 Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

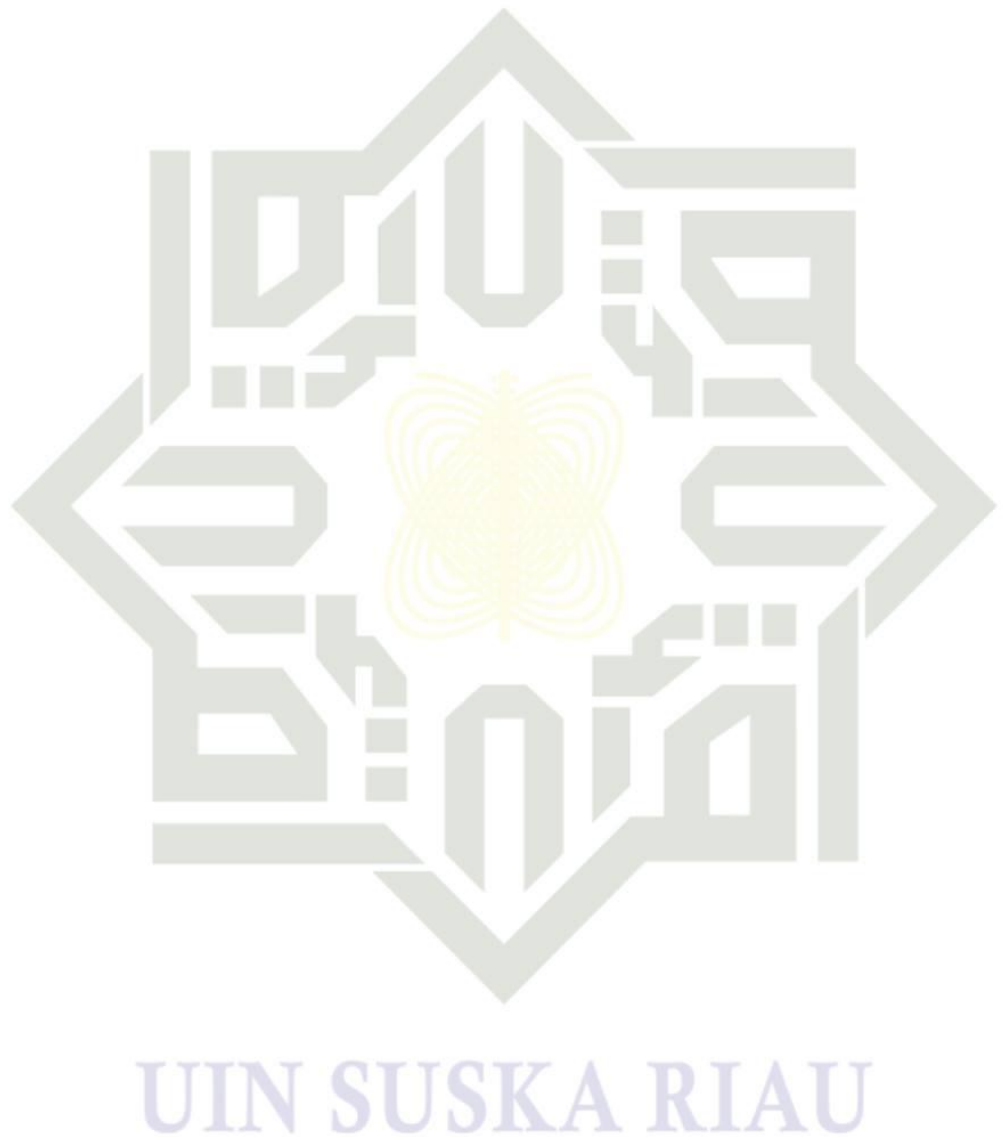
3.1.5.3 Objek Pajak.....	35
3.1.6 Pajak Bumi dan Bangunan.....	37
3.1.7 Pengertian Pajak Dalam Islam.....	40
3.1.8 Karakteristik Pajak Dalam Islam.....	42
3.1.9 Pendapat Ulama Tentang Pajak Dalam Islam.....	42
3.1.10 Hukum Pajak Dalam Islam.....	44
3.2 Tinjauan Praktek.....	45
3.2.1 Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP).....	45
3.2.2 Tahapan Pelaksanaan SISMIOP.....	46
3.2.3 Struktur SISMIOP.....	47
3.2.4 Mekanisme Perekaman Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	50
3.2.5 Manfaat dan Kendala Perekaman Data Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	53
BAB IV PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan.....	54
4.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.	Struktur Organisasi BKD Kabupaten Siak.....	10
Gambar 2.3.	Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.....	11

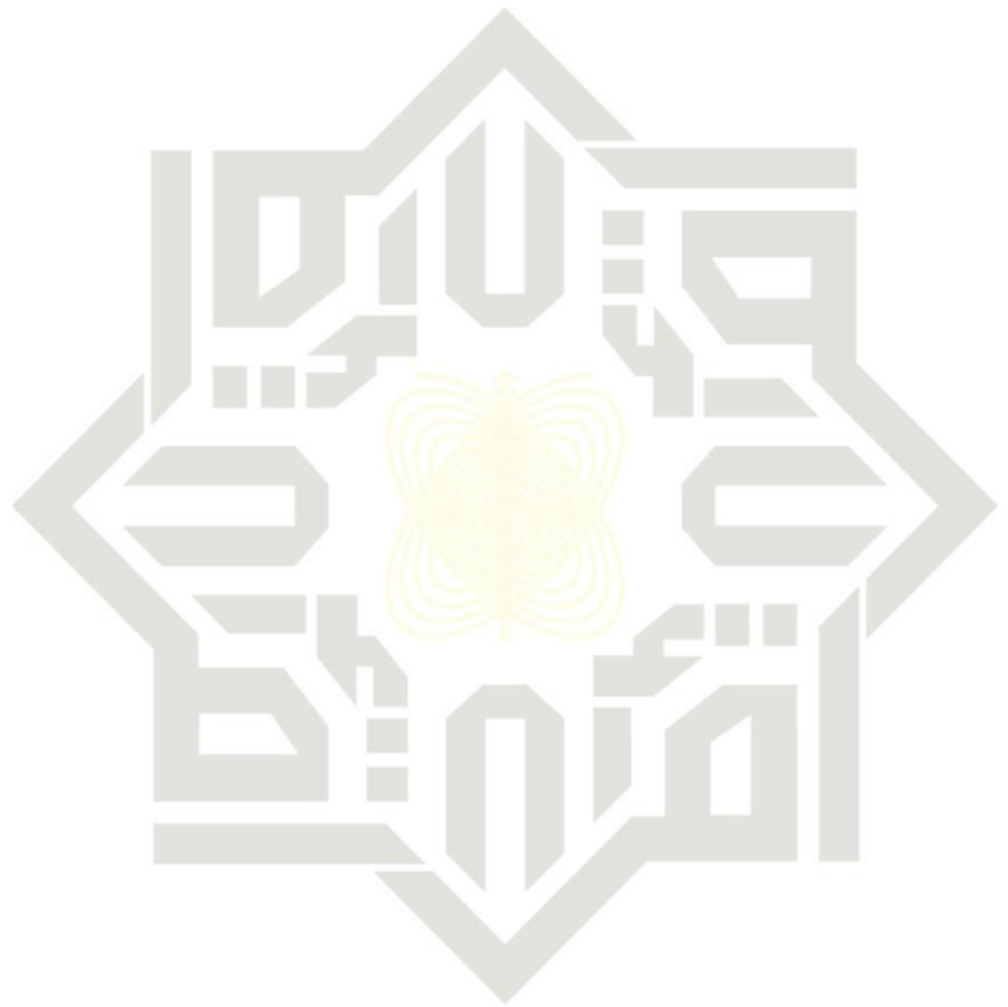


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Table 1. Rincian Rekaman Data wajib pajak dan pokok PBB yang telah di bayar tahun 2016.....	51
Table 2. Rincian Rekaman Data wajib pajak dan pokok PBB yang telah di bayar tahun 2017.....	52



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia termasuk dalam Negara Berkembang. Indonesia saat ini banyak melakukan pembangunan di segala bidang seperti bidang hukum, politik, pendidikan, ekonomi serta bidang-bidang lainnya yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di setiap negara memerlukan biaya yang besar, oleh karena itu sumber biaya yang bisa diharapkan mengalami peningkatan salah satunya dapat berasal dari pajak.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan dan melaksanakan pembangunan nasional dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Pajak dikategorikan pengelolaannya menjadi pajak yang dapat dikelola oleh pemerintah pusat dan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebelum tahun 2014 pajak bumi dan bangunan termasuk dalam jenis pajak pusat, akan tetapi berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan telah diserahkan kepada kota/kabupaten. Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak yang objeknya bumi dan bangunan dan wajib pajaknya orang atau badan yang memiliki, menguasai dan atau mengambil manfaat atas bumi dan bangunan. Berdasarkan hal tersebut jumlah objek dan wajib pajak PBB sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah.

Menurut Pasal 77 ayat (1) UU tahun 2009 yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Semua jenis organisasi baik, organisasi pemerintah maupun organisasi swasta menggunakan sistem yang digunakan untuk mengatur operasional organisasi. Sistem informasi diharapkan dapat memudahkan suatu organisasi dalam menyelesaikan pekerjaannya. Organisasi pemerintah seperti bidang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpajakan juga menggunakan sistem yang didalamnya terdapat aplikasi (*software*). Aplikasi yang digunakan pada sistem administrasi perpajakan modern PBB yaitu sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP).

SISMIOP merupakan jantung PBB karena seluruh aspek pengelolaan administrasinya yang dapat mengelola data objek pajak dan subjek pajak yang sudah terkomputerisasi mulai dari proses pendataan penilaian, penangihan, penerimaan dan pelayanan. Adanya SISMIOP dimaksudkan untuk menciptakan suatu basis data yang akurat dan *up to date* dengan mengintegrasikan semua aktivitas administrasi PBB kedalam suatu wadah, sehingga pelaksanaannya lebih seragam, sederhana, cepat dan efisien.

Siak Sri Indra Pura merupakan Kabupaten Provinsi Riau yang juga termasuk salah satu daerah otonom. Kalau dilihat dari konsepsi otonomi daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) bahwasannya setiap daerah harus mampu mengerjakan dan menjalankan roda pemerintahannya sendiri. Maka dari itu pihak aparat daerah harus mampu memenuhi setiap kebutuhan yang ada di daerah ini dan terkhususnya dalam melakukan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dapat kita ketahui bahwa sektor pajak daerah sendiri merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting pada Kabupaten Siak untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan konteks pemberian otonomi daerah yang menghendaki terwujudnya pelaksanaan berbagai-bagai pembangunan di daerah melalui pembiayaan sendiri.

Pajak Daerah terdiri dari berbagai jenis pajak yang terkait dengan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Masing-masing jenis pajak daerah memiliki objek, subjek, tarif dan berbagai ketentuan pengenaan tersendiri, yang mungkin berbeda dengan jenis pajak lainnya. Sehingga mungkin saja satu jenis pajak pada suatu daerah, mungkin tidak dipungut di daerah lainnya. Selain itu, kalau pun dipungut pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan pun tidak sama persis. Salah satu



kondisi diatas memang dimungkinkan dalam pengenaan dan pemungutan pajak. Agar tidak membingungkan dan merugikan masyarakat, peraturan tentang pajak daerah harus disosialisasikan kepada masyarakat sehingga dapat dipahami dengan jelas.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan atas harta yang tak bergerak, yang menjadi perhatian utamanya adalah objeknya dan oleh karna itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subjek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karna itu pajak ini juga disebut pajak yang Objektif. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 86 Tahun 2016 pada Pasal 22 G yakni Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak memiliki tugas melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB. Pada awalnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak menggunakan metode perekaman data wajib pajak secara manual, karna banyaknya keluhan dari pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dan wajib pajak karna proses perekaman data begitu lama maka pada tahun 2013 pemerintah daerah Kabupaten Siak mulai menggunakan Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam proses pendaftaran wajib pajak atau pembayaran pajak bumi dan bangunan.
2. Menghindari terjadinya kesalahan dalam perekaman data wajib pajak atau objek pajak.
3. Mempermudah pegawai pajak dalam menghitung pajak PBB.
4. Menghindari terjadinya kekeliruan antara pegawai pajak dengan wajib pajak apabila wajib pajak melaporkan kebereratan saat membayar pbb.
5. Menghindari terjadinya kehilangan data wajib pajak.

Perekaman data dan input menggunakan sistem informasi akan lebih banyak memanfaatkan sistem jika sistem informasi tersebut mudah digunakan. Sebaliknya jika sistem informasi tidak mudah digunakan (rumit) pemakai akan lebih sedikit dalam memanfaatkan sistem informasi tersebut. Davis (1989) juga menyatakan bahwa penggunaan sistem aplikasi spesifik akan meningkatkan kinerja dan juga menemukan hubungan kuat antara penggunaan komputer dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dengan menggunakan aplikasi *Sistem Informasi dan Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP)* yang sedang berjalan saat ini dan kinerja pegawai di Kantor Pelayanan Pajak Kabupaten Siak.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, mendasari penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ **Analisis Perekaman Data Wajib Pajak dari Hasil Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin mengambil suatu rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Keaungan Daerah Kabupaten Siak?
2. Apa saja manfaat dan kendala perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perekaman data wajib pajak bumi da bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.
2. Untuk mengetahui manfaat dan kendala perekeman data wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan penulis dalam penyelesaian tugas akhir, Dapat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan sehingga dapat memiliki pengalaman lebih dalam bidang perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Pemungutan maupun Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Siak. Kepada instansi dan dapat sebagai bahan masukan kepada pegawai-pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

1.5 Metode Penulisan

Metode penulisan penelitian yang di gunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan adalah di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak di Komplek perkantoran Tanjung Agung, Kecamatan Mampura, Kabupaten Siak Sri Indrapura.

1.5.2 Waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 1 Juli 2019 hingga selesai.

1.5.3 Jenis Data.

Dalam penulisan penulis menggunakan data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang penulis ambil secara langsung diambil dari obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang penulis ambil secara tidak langsung dari objek penelitian. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dijadikan dalam bentuk dokumen, arsip dan catatan lain yang diperlukan.

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan dan penelitian data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi



Observasi sendiri adalah perolehan aktif informasi dari sumber utama. Penulis mengamati langsung turun kelokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah sistem perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Pengambilan data melalui wawancara secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telepon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengambil data-data dan catatan dokumentasi, arsip, administrasin yang sesuai dan yang penulis butuhkan tentang Pengenaan dan Pemungutan PBB. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh dari dokumen- dokumen dan arsip yang didapat dari tempat penelitian.

1.5.5 Analisis Data

Penulisan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang bersifat deskriptif, yaitu statistic yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir ini, maka penulis membagi menjadi empat (4) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Analisis dan Sistematika Penulisan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BAB II : GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK**

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, serta struktur organisasi dan aktivitas yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab Ini Berisikan Pengertian Pajak, Fungsi Pajak, syarat pemungutan pajak, Jenis-Jenis Pajak dan Objek Pajak, Pengertian Pajak Bumi Dan Bangunan, Objek Pajak Bumi dan Bangunan, Subjek Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar Pengenaan dan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Tarif Pajak Bumi dan Bangunan, Cara menghitung Pajak Bumi dan Bangunan, mekanisme perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan. Kendala-Kendala yang terjadi dalam perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

BAB IV : PENUTUP

Bab Ini Berisikan tentang kesimpulan dan saran mengenai hal – hal yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta saran yang menjadi bahan masukan bagi penulis sehingga laporan akan menjadi lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN SIAK

2. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Badan Keuangan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Keuangan. Badan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Rincian ketugasan, fungsi dan tata kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 86 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak.

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas untuk melayani wajib pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang PBB dan BPHTB yang berada dalam wilayah Kab. Siak yaitu meliputi kecamatan :

1. Kecamatan Minas
2. Kecamatan Mandau
3. Kecamatan Siak
4. Kecamatan Kerinci Kanan
5. Kecamatan Tualang
6. Kecamatan Dayun
7. Kecamatan Koto Gasib
8. Kecamatan Mempura

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



9. Kecamatan Sabak Auh
10. Kecamatan Sungai Apit
11. Kecamatan Bunga Raya
12. Kecamatan Pusako
13. Kecamatan Kandis

Sejalan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8), dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pembiayaan, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran;
 2. Sub Bidang Belanja Pegawai; dan
 3. Sub Bidang Perbendaharaan.
- d. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



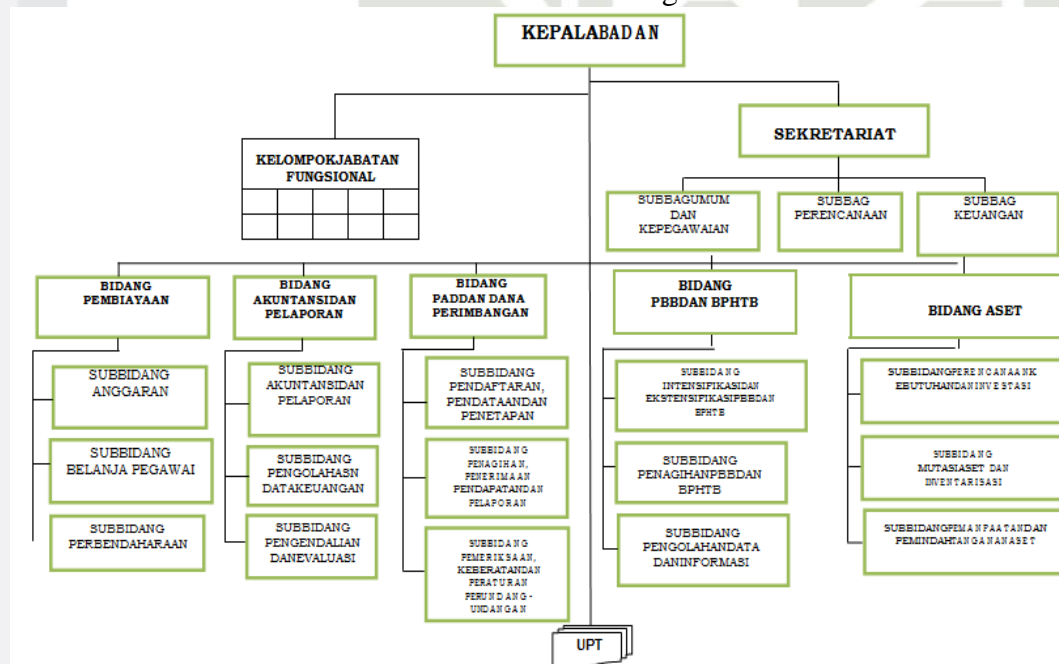
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan; dan
3. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- e. Bidang PAD dan Dana Perimbangan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan penetapan;
 2. Sub Bidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Bidang PBB dan BPHTB, membawahi :
 1. Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB;
 2. Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB; dan
 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
- g. Bidang Aset, membawahi :
 1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi;
 2. Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi; dan
 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset.
- h. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Gambar 1. Struktur Organisasi BKD



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak



2.3 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai Visi dan Misi yang digunakan untuk membangun Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik lagi,

1. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah secara konsisten dan tegas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Mengacu pada batasan tersebut, maka didalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak 2016-2021.

Gambar 2. Visi Badan Keuangan Daerah



Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

2. Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Sebagai unsur pelaksana pengelolaan keuangan, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

- a. Meningkatkan porsi pendapatan asli daerah terhadap APBD secara berkesinambungan. Sasarannya adalah tercapainya realisasi pendapatan asli daerah yang lebih besar setiap tahunnya.
- b. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan keuangan daerah. Sasarannya adalah terselenggaranya pengelolaan keuangan sesuai standar yang ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Meningkatkan pelayanan yang responsif. Sasarannya adalah terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran yang berkualitas.

2.4 Uraian Tugas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak

Adapun uraian tugas dari badan keuangan daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

2.4.1 Kepala Badan

Kepala Badan Keuangan dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja dinas sesuai dengan visi dan misi daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan aset daerah;
- c. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di bidang pendapatan daerah serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Badan;
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas sekretariat, bidang-bidang, UPTB dan kelompok jabatan fungsional;
- e. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Badan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja dinas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

2.4.2 Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyusun kebijakan, mengordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rancangan kebijakan Badan;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pengordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTB;
- c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan Badan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan Badan;
- h. Penyusun profil Badan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan surat menyurat;
- b. melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
- c. mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;
- d. mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan, LP2P / LHKPN / LHKASN;
- f. mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- g. mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



2.4.2.2 Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana operasional program kerja subbagian Perencanaan;
- b. Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- c. Memberi petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya;
- d. Menyusun rencana perjalanan dinas;
- e. Mengendalikan rencana tahunan;
- f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- g. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
- i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
- j. Melaksanakan penyusunan bahan Rencana Strategis (Renstra);
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- l. Melaksanakan penyusunan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
- n. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- o. Mengevaluasi hasil program kerja;
- p. Membuat laporan hasil kegiatan;
- q. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.2.3 Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Membuat rencana operasional program kerja Sub bagian Keuangan;
- b. Membuat daftar usulan kegiatan;
- c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Menyiapkan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku kas umum;
- f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- h. Mengajukan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) yang ditetapkan sebagai Pengguna Anggaran dengan keputusan Bupati;
- i. Memeriksa pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;
- j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
- k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertyanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;
- l. Mengevaluasi hasil program kerja;
- m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK);
- n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.3 Bidang Pembiayaan

Adapun bidang pembiayaan sebagai berikut :

- (1) Kepala Bidang Pembiayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembiayaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pembiayaan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kabupaten meliputi kebijakan umum APBD dan prioritas dan flapon anggaran semester;
- d. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- f. Pelaksanaan upaya pemecahan masalah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
- g. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Bidang Pembiayaan;
- h. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian anggaran;
 - i. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.3.1 Sub Bidang Anggaran

Adapun bagian sub bidang anggaran sebagai berikut :

- (1) Kepala Sub Bidang Anggaran, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Menyiapkan surat edaran tentang pedoman penyusunan rka-skpd, menghimpun dan mengelola usulan anggaran belanja tidak langsung dan pembiayaan, menyusun lampiran Ranperda tentang APBD dan perubahan APBD;
 - d. Melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD serta pengendalian surat penyediaan dana (SPD) belanja langsung dan belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - e. Menyiapkan kode rekening pengelolaan keuangan daerah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyiapkan dokumen perubahan atau pergeseran anggaran;
- g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.3.2 Sub Bidang Belanja Pegawai

Adapun sub bagian belanja pegawai sebagai berikut :

- (1) Kepala Sub Bidang Belanja Pegawai mempunyai tugas:
 - a. Menyusun program dan rencana kegiatan sub bidang;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dan rumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Menghimpun, melaksanakan penginputan data perubahan gaji penerbitan dan penata usahaan data gaji SKPD, melaksanakan rekonsiliasi data gaji PNS;
 - d. Menginvestarisasi, mengkoordinasikan dan mempersiapkan dokumen / aturan pendukung bagi pelaksanaan APBD berikut rencana perubahannya sesuai lingkup tugasnya;
 - e. Memproses surat keterangan penghentian pembayaran (SKPP) gaji PNS;
 - f. Menghimpun dan memproses potongan fihak ketiga (PFK) atas gaji PNS;
 - g. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang;
 - i. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan; dan
 - j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.3.3 Sub Bidang Perbendaharaan

Adapun sub bidang perbendaharaan sebagai berikut :

- (1) Kepala Subbidang Perbendaharaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan bidang;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Merumuskan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
- c. Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi belanja dan pembiayaan serta pengelolaan kas daerah, yaitu : penelitian kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar, menetapkan penerbitan dan surat penolakan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada belanja tidak langsung dan belanja langsung;
- d. Melaksanakan Sistem Pengeluaran kas daerah, pengeluaran APBD dan Perubahan APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang Pemerintah Daerah, pemantauan suku bunga bank;
- e. Melaksanakan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
- h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.4 Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Adapun sub bidang akuntansi dan pelaporan sebagai berikut :

- (1) Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Akuntansi dan Pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja bidang yang mengacu pada rencana strategis Badan;
 - b. Pelaksanaan pencatatan dan pelaporan akuntansi atas pelaksanaan APBD;
 - c. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan teknis yang berkaitan dengan akuntansi;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang;
- e. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.4.1 Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan

(1) Kepala Subbidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, menyusun laporan realisasi anggaran pemerintah daerah, menyiapkan penyusunan dan penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan, meminta kepada Kepala SKPD sebagai PA/KPA untuk menyampaikan laporan keuangan dan kinerja sekurang-kurangnya setiap semesteran;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.4.2 Sub Bidang Pengolahan Data Keuangan

(1) Kepala Subbidang Pengolahan Data Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan seksi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan Fungsional, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan penerimaan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.4.3 Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

(1) Kepala Subbidang Pengendalian dan Evaluasi tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan, penggolongan, pencatatan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan dalam pelaksanaan APBD, meneliti dan memeriksa kelengkapan SPJ penerimaan Fungsional, menyiapkan bahan Kebijakan Akuntansi dan pelaporan penerimaan, menyiapkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bersama dengan Subbidang Akuntansi dan Pelaporan dalam rangka penggabungan laporan pertanggungjawaban keuangan dan aset daerah;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.5 Bidang PAD dan Dana Perimbangan

(1) Kepala Bidang PAD dan Dana Perimbangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PAD dan Dana Perimbangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PAD dan DANA Perimbangan mempunyai fungsi:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Penyusunan rencana kerja mengacu pada rencana strategis Badan;
- b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan pajak daerah;
- c. Pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. Penerapan standar pengelolaan pendapatan;
- e. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penghitungan, penetapan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
- i. Pelaksanaan perencanaan, pengendalian operasional, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- j. Pengelolaan dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi;
- k. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait dalam pengelolaan dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja bidang; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.5.1 Sub bidang Pendaftaran

(1) Kepala Subbidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan rencana kegiatan Sub Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- b. Melaksanakan pendaftaran;
- c. Melaksanakan pendataan dan penetapan;
- d. Melaksanakan penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- e. Melaksanakan pengisian dan pemeliharaan kartu wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Menyampaikan kartu pengenalan NPWPD;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan penyampaian dan/atau menerima kembali surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD);
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran;
 1. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
 2. Melaksanakan penghitungan dan penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - k. Melaksanakan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - l. Pelaksanaan pendokumentasian pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - m. Melaksanakan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi jenis pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - n. Melaksanakan data potensi pajak dan Retribusi Daerah;
 - o. Melaksanakan penyusunan data sebagai bahan kajian perumusan kebijakan teknis, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan pendaftaran, pendataan dan penetapan; dan
 - p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.5.2 Sub Bidang Penagihan

- (1) Kepala Subbidang Penagihan, Penerimaan Pendapatan dan Pelaporan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang;
 - b. Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan pengembalian restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Melaksanakan administrasi penerbitan dokumen penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;



- e. Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan Sub Bidang;
- f. Melaksanakan penyusunan data sebagai baham kajian perumusan kebijakan, bimbingan dan pembinaan serta petunjuk teknis yang berkaitan dengan penagihan;
- g. Melaksanakan pembuatan surat teguran kepada wajib pajak yang belum melunasi pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- h. Melaksanakan pembuatan laporan penerimaan pendapatan perobyek pajak dan retribusi daerah dan dana transfer;
- i. Menyusun laporan piutang pajak daerah dan retribusi daerah serta putang dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi;
- j. Melaksanakan penagihan dana transfer pusat dan daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4.5.3 Sub Bidang Pemeriksaan

- (1) Kepala Subbidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas :
- a. Menyusun program dan rencana kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan administrasi pelayanan keberatan dan permohonan pengembalian restitusi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Menerima dan melayani surat permohonan banding atas materi penetapan pajak dan retribusi daerah;
 - e. Menyiapkan keputusan menerima atau menolak keberatan dan meneruskan penyelesaian permohonan banding;
 - f. Menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dan retribusi daerah;
 - g. Melakukan pemeriksaan terhadap pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan Sub Bidang Pemeriksaan, Keberatan dan Peraturan Perundang-undangan secara periodik;
- i. Melaksanakan pengumpulan bukti, penganalisaan, pengkajian dan membuat laporan pertimbangan dan keberatan pajak daerah dan redistribusi daerah;
- j. Menyusun peraturan yang berkaitan tentang pajak daerah dan redistribusi daerah; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.6 Bidang PBB dan BPHTB

- (1) Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang PBB dan BPHTB mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan perencanaan kerja yang mengacu pada perencanaan strategis Badan;
 - b. Perumusan bahan kebijakan dan petunjuk teknis pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan PBB dan BPHTB;
 - d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan serta pengendalian skala kabupaten;
 - e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelayanan dan pendaftaran PBB;
 - f. Pelaksanaan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rumusan dan langkah strategis penerimaan PBB dan BPHTB;
 - g. Pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan/pengendalian dan pelaporan kegiatan bidang;
 - h. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja;
 - i. Pelaksanaan penyajian data dan informasi penerimaan PBB, BPHTB, dana bagi hasil dan penerimaan lainnya; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.4.6.1 Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB

(1) Kepala Sub Bidang Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan administrasi pendaftaran baru objek PBB sebagai objek baru yang belum terdaftar pada administrasi PBB dan sismiop PBB;
- b. Melaksanakan administrasi mutasi objek dan subjek pajak adalah perubahan atas objek dan subjek pajak PBB;
- c. Melaksanakan pembetulan SPPT/SKP;
- d. Melaksanakan evaluasi ketetapan nilai jual objek pajak;
- e. Melaksanakan penghitungan penetapan nilai objek pajak PBB;
- f. Melaksanakan adminitrasi keberatan atas permohonan dari wajib pajak;
- g. Melaksanakan administrasi pengurangan atas besarnya pajak terutang atas permohonan wajib pajak terhadap ketetapan PBB;
- h. Melaksanakan restitusi, administrasi kelebihan pembayaran PBB dalam bentuk uang tunai atau pemindahbukuan;
- i. Melaksanakan kompensasi kelebihan pembayaran PBB yang diperhitungkan atas hutang PBB lainnya yang sudah/belum jatuh tempo atau ketetapan PBB diperhitungkan dengan ketetapan PBB yang akan datang;
- j. Melaksanakan pendistribusian atas ketetapan PBB tahun berjalan;
- k. Melaksanakan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang;
- l. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bidang; dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.6.2 Sub Bidang Penagihan PBB dan BPHTB

(1) Kepala Subbidang Penagihan PBB dan BPHTB mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penatausahaan dan pemrosesan dokumen masuk di Sub Bidang penagihan;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Melaksanakan penyampaian dan pengisian kartu pengawasan tunggakan penagihan;
- c. Melaksanakan penatausahaan surat keputusan keberatan/ banding pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pada Sub Bidang penagihan;
- d. Melaksanakan penyelesaian usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
- e. Melaksanakan penagihan pajak sementara dan sekaligus;
- f. Melaksanakan penghapusan piutang pajak;
- g. Melaksanakan dan tata cara :
 - 1) Menjawab konfirmasi data tunggakan wajib pajak;
 - 2) Menyelesaikan permohonan penundaan pembayaran pajak;
 - 3) Menyelesaikan usulan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
 - 4) Menyelesaikan dan penyampaian surat teguran penagihan;
 - 5) Melaksanakan penerbitan dan pemberitahuan Surat Paksa;
 - 6) Melaksanakan penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMT);
 - 7) Melaksanakan penerbitan surat keputusan pencabutan sita;
 - 8) Melaksanakan pelelangan;
 - 9) Melaksanakan penyelesaian pembatalan permohonan lelang;
 - 10) Melaksanakan pembuatan laporan Sub Bidang penagihan;
 - 11) Melaksanakan penyelesaian permohonan pengangsur pembayaran pajak.
- h. Melaksanakan perencanaan, pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.6.3 Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi

- (1) Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pengelolaan data pendaftaran dan penerimaan;



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- b. Melaksanakan pengelolaan data terhadap adanya mutasi data dan perekam data PBB;
 - c. Melaksanakan penetapan ketetapan sebagai tindak lanjut adanya perubahan dan pengembangan data PBB dan BPHTB;
 - d. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan system (back up data);
 - e. Melaksanakan pelaporan dan pemeliharaan data potensi PBB dan basis data PBB (sismiop PBB);
 - f. Melaksanakan pembuatan salinan SPPT SKP/SPT sebagai pengganti SPPT yang rusak, hilang atau belum diterima;
 - g. Melaksanakan perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB dan BPHTB;
 - h. Melaksanakan validasi penerimaan pembayaran SSB;
 - i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPAT;
 - j. Melaksanakan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB dan menyepurnakan system pembentukan basis data PBB dan BPHTB;
 - k. Melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penyusunan langkah strategis dalam pencapaian penerimaan PBB dan BPHTB; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.7 Bidang Aset

- (1) Kepala Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Aset.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Aset mempunyai tugas :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
 - b. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
 - c. Perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi aset dan inventarisasi serta pemanfaatan dan pemindahtanganan aset, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pelaksanaan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali; dan
- 2) Pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian kekayaan daerah evaluasi daftar hasil pengadaan barang daerah, pemantauan dan pengawasan kepemilikan aset daerah serta dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan.
 - d. Pelaksanaan hubungan kerjasama pelaksana tugas dengan SKPD terkait;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
 - f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Badan;
 - g. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.7.1 Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi

- (1) Kepala Subbidang Perencanaan Kebutuhan dan Investasi mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
 - b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusah kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
 - c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang milik daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang milik daerah, dan merekap rencana kebutuhan barang milik daerah yang terdiri dari RKBMD pengadaan, RKBMD pemeliharaan, RKBMD pemanfaatan, RKBMD pemindahtanganan dan RKBMD penghapusan;



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai pengelolaan aset investasi;
- e. Membantu pelaksanaan evaluasi secara berkesinambungan pelaksanaan investasi pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu;
- f. Membantu koordinasi pelaksanaan investasi dengan instansi terkait;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala bidang; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.7.2 Sub Bidang Mutasi Aset dan Inventarisasi

(1) Kepala Subbidang Mutasi Aset dan Inventarisasi mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan kebijakan umum dan teknis rencana kebutuhan aset daerah, penelitian dan pengkajian kebutuhan barang daerah sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang, mengikuti pelaksanaan pelelangan barang dan bangunan, pelaksanaan administrasi barang daerah, penilaian dan penyusutan aset daerah, pencatatan barang milik daerah, inventarisasi data aset daerah, penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah serta pelaksanaan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2.4.7.3 Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset

(1) Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset mempunyai tugas :

- A. Menyusun program kerja dan rencana kegiatan Sub Bidang;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- B. Menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- C. Melaksanakan penyusunan pedoman petunjuk teknis pemanfaatan dan pengendalian, evaluasi pemanfaatan barang milik daerah, dan pelaksanaan pemindahtanganan aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengawasan kepemilikan aset daerah beserta dokumen kepemilikan aset;
- D. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan evaluasi kegiatan;
- E. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang; dan
- F. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya tentang perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Mekanisme perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
 - a. Pendataan SPOP dan LSPOP, dengan poin yang diinput sebagai berikut :
 - Jenis Formulir, Jenis Transaksi, Nomor Formulir dan Nomor Objek Pajak
 - b. Basis data adalah suatu kumpulan informasi objek pajak bumi dan bangunan serta data pendukung lainnya dalam suatu wilayah administrasi pemerintahan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan data.
2. Manfaat dan Kendala perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :
 - a. Adapun manfaat dari diberlakukannya
 - a) Pelayanan pelaporan dari wajib pajak menjadi lebih cepat
 - b) Mendapatkan informasi dan data dari wajib pajak lebih akurat
 - c) Pelacakan informasi data pegawai lebih mudah dan cepat;
 - d) Memudahkan dalam pengelolaan beban kerja kepada pegawai;
 - e) Memudahkan pembagian tugas kerja secara tim;
 - f) Pencetakan data wajib pajak menjadi lebih cepat;
 - g) Tidak membutuhkan tenaga kerja yang banyak;
 - b. Hambatan dari diberlakukannya perekaman data wajib pajak bumi dan bangunan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:
 - a) Sering terjadi gangguan pada internet dan masalah dari *server* pusat.
 - b) Adakalanya terjadi *error* saat aplikasi diakses.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Masalah teknis seperti kabel-kabel yang tidak tertata dengan rapi yang membuat koneksi internet tidak stabil.
- d) Beberapa pegawai yang mengalami kesulitan saat mengakses aplikasi yang baru diperbaharui.
- e) *Server* untuk *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Registrasi* dan *e-Billing* yang masih terpisah, sehingga wajib pajak tidak bisa mengurus laporannya sekaligus. Wajib pajak harus menunggu laporan sebelumnya untuk menyelesaikan laporan berikutnya.
- f) Ketika ada perubahan sistem aplikasi dari pusat, pihak dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak lambat melakukan penyesuaian.

4.2 SARAN

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak harus lebih meningkatkan lagi mutu pelayanan dalam perekaman data wajib pajak agar tidak terjadi penginputan data wajib pajak yang salah.
2. Pengawasan yang lebih terhadap aplikasi Sistem manajemen informasi objek pajak (SISMIOP) yang masih sering terjadi *error* saat melakukan perekaman data wajib pajak.
3. Lebih meningkatkan jaringan internet yang lebih stabil dan melakukan pemeriksaan server yang masih sering ada gangguan.





DAFTAR PUSTAKA

- Aprianty, Rika Dwi dan Robert Lambey. 2016. Evaluasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOP) Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Emba*. Vol. 4 No.1 Maret 2016.
- Fa'arib, Husnul dan Amalia Rizmaharani. 2018. Pajak Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Konsep Pajak Dan Sistem Perpajakan Dalam Keadilan Islam). *Jurnal Hukum*. Vol. 15. No.2 November 2018.
- Gazali. 2015. Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Volume VII, Nomor 1 Juni 2015.
- Huda Fadila, David P.E Saerang dan Inggriani Elim. 2015. Analisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Atas Perekaman Surat Pemberitahuan SPT. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Volume 15 No. 03 Tahun 2015.
- Mardiasmo, *PERPAJAKAN*, Andi, Yogyakarta, 2016
- Marihot Pahala, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 86 Tahun 2016, Pasal 22 G tentang perekaman data dan input data dari hasil penerimaan pembayaran PBB*, Kabupaten Siak, 2016
- Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 8 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah*, Kabupaten Siak, 2016
- Peraturan Bupati Kabupaten Siak No. 86 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak*, Kabupaten Siak, 2016
- Primadita Fitriandi, Yuda Ariyanto, Agus Puji Priyono, *Undang-Undang Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta, 2015
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi Sepuluh*, Salemba Empat, Jakarta, 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siahaan, Pahala, Marihot, *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009

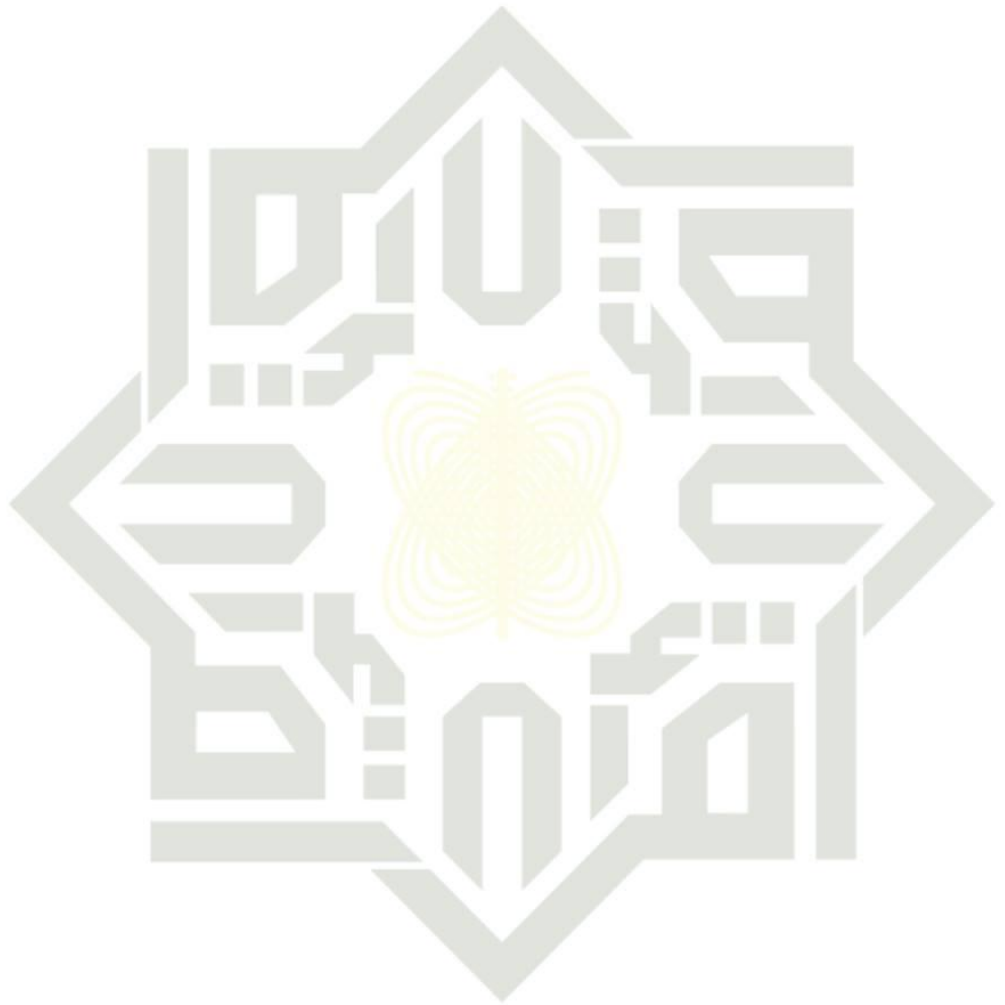
Turmudi, Muhammad. 2015. *Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat)*. *Jurnal Al 'Adl*. Vol. 8 No. 1, Januari 2015.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK BADAN KEUANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN TANJUNG AGUNG
KECAMATAN MEMPURA KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU
TELEPON. (0764) 320996 / FAX. (0764) 320996

Siak, 10 Agustus 2020

985 / BKD-Sekr /

Surat Balasan Penelitian

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Siak Nomor: 07/Kesbangpol/83 tanggal 12 Maret 2020, perihal izin melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak maka kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU bahwa mahasiswa yang berketerangan di bawah

Nama : MHD ICHSAN FATHURRAHMAN

: 01770613202

Program Studi : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Judul Penelitian : "ANALISIS PEREKAMAN DATA WAJIB PAJAK DARI HASIL PENERIMAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SIAK"

Telah melakukan penelitian di Kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak pada tanggal 16 sampai 17 Maret 2020. Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SIAK,

Drs. H. YAN PRANA JAYA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651013 199503 1 001



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Fungsinya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
c. Mengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
d. Mengutipan harus mencantumkan dan menyebutkan sumber yang dikutip atau sebagian atau seluruhnya.
e. Diinstitusikan dan diinstitusikan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Mhd. Ichsan Fathurrahman, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 20 November 1998 yang merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara dengan kakak yang bernama Lailatul Syfa dan adik yang bernama Mhd. Haikal Ramadhan yang lahir dari pasangan ayah yang bernama Zulkarnain dan ibu yang bernama Sudarmi.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Iqro' Pematang Siantar (2004-2005), SD Negeri 123370 Pematang Siantar (2005-2011), SMP Negeri 4 Pematang Siantar (2011-2014), SMA Perguruan Taman Siswa (2014-2017). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak selama dua bulan, yaitu pada bulan Juli sampai Agustus 2019.

Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan tugas akhir yang berjudul : **“Analisis Perekaman Data Wajib Pajak Dari Hasil Penerimaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Siak”**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.